

DAFTAR PUSTAKA

- Aprilianti, Silvia & Nur Pratiwi, Ratih dkk. (2020). “Gaya Kepemimpinan Lurah Sebagai Upaya Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan”. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*. Vol. 3, No. 1. Hal. 96-101.
- Cahyani & Noviyari. (2019). Pengaruh Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. Vol. 26 No.3. Hal. 1885-1911.
- Ghozali, Imam. (2021). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Semarang : Universitas Diponegoro.
- Hantono, Fridolend, Riko Sianturi. (2021). “Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Pada UMKM Yang Ada Di Kota Medan. *Jurnal Audit dan Perpajakan* Vol. 1 No.1 Tahun 2021. Hal. 26-40.
- Hambali. (2017, Oktober). “Kepemimpinan Lurah Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Di Kelurahan Labuh Baru Barat Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru”. *Jurnal Online Mahasiswa Fisip* Vol. 4 No. 2.
- Handayani, Rini. (2017, Mei - Agustus). “Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Motivasi Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Bagi Masyarakat Di Wilayah Kelurahan Cibeber Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi”. *Jurnal Indonesia Membangun*. Vol. 16, No. 2. Hal. 134-149.
- Indrawan, Rizki & Bani Bineka. (2018). Pemahaman Pajak dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UKM. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*. Vol 6 No.3. Hal. 419-428.
- Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-251/PJ./2000 tentang Tata Cara Penetapan Besarnya Nilai Jual Kena Pajak Tidak Kena Pajak sebagai Dasar Penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan
- Keputusan Menteri Keuangan No. 1004/KMK.04/1985 tentang penentuan Badan atau Perwakilan Organisasi Internasional yang menggunakan Objek Pajak Bumi dan Bangunan yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan.
- Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 523/KMK.04/1998 tentang Penentuan Klasifikasi dan Besarnya Nilai Jual Objek Pajak.

- KMK No. 201/KMK.04/2000 tentang penyesuaian besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP).
- Peraturan Walikota Medan No 4 Tahun 2021 mengenai klasifikasi serta besarnya Nilai Jual Objek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan Di Kota Medan
- Qadar Hasratul, Subhilhar. (2021). “Peran Lurah Dalam Mendorong Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pajak Bumi dan Bangunan. *Jurnal Ilmiah* Vol. 8 No.1. Hal. 11-16.
- Resmi, Siti. (2017). *Perpajakan : Teori & Kasus*. Edisi 10. Jakarta: Salemba Empat.
- Republik Indonesia. (2022). *Undang-Undang No.1 tahun 2021 tentang Pajak Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah*. Jakarta : Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Republik Indonesia. (1994). *Undang-Undang No.12 tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan*. Jakarta : Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Republik Indonesia. (2007). *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan*. Jakarta : Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta : Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- .